

BAB II

DINAMIKA POLITIK DALAM DAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI

Arab Saudi merupakan negara yang memiliki banyak peranan di Jazirah Arab serta lingkungan global. Negara yang masih menganut sistem kerajaan ini ditunjang dengan cadangan dan produksi minyak yang melimpah sebagai penyokong utama perekonomian negara menyebabkan negara tersebut di segani oleh masyarakat internasional. Terlepas dari alasan tersebut, Arab Saudi juga menjadi kiblat bagi umat muslim di seluruh dunia karena terdapat dua kota yakni Mekkah dan Madinan sebagai salah satu tempat yang disucikan sekaligus lahirnya peradaban muslim era Nabi Muhammad SAW.

A. Kondisi Geografis Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab. Arab Saudi terletak di antara 15°LU - 32°LU dan antara 34°BT - 57°BT. Wilayah Arab Saudi meliputi empat perlima dari Semenanjung Arab dan berada di lokasi yang strategis yang membentang dari Teluk Persia sampai Laut Merah. Luas tanah Arab Saudi adalah 2.149.690 km². Jumlah penduduk Arab Saudi mencapai 27.345.986 jiwa. Arab Saudi berbatasan langsung (searah jarum jam dari arah utara) dengan Yordania, Irak, Kuwait, Teluk Pesia, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dan Laut Merah. Pada masa dahulu daerah Arab Saudi dikenal menjadi dua bagian yaitu daerah Hijaz yakni daerah pesisir barat Semenanjung Arab yang didalamnya terdapat kota-kota,

diantaranya adalah Mekkah, Madinah dan Jeddah serta daerah gurun Najd yakni daerah-daerah gurun sampai pesisir timur Semenanjung Arab yang umumnya dihuni oleh suku-suku lokal Arab (Badui) dan Kabilah-kabilah Arab lainnya.¹



Gambar 2.1 Peta Arab Saudi (Foto: Epos)

Mayoritas penduduk Arab Saudi adalah Bangsa Arab yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa nasional. Secara umum bahasa Arab yang digunakan oleh masyarakat Arab Saudi ada dua macam, yaitu bahasa Arab fushah (bahasa Arab

¹ "Arab Saudi", dalam <http://kemlu.go.id/riyadh/Pages/CountryProfile.aspx?l=jd>, diakses 20 November 2016

standar/baku) dan bahasa Arab amiyah (bahasa arab pasaran). Bahasa Arab fushah umumnya digunakan dalam komunikasi resmi, misalnya di sekolah, kantor, dan ruang publik formal lainnya. Sementara bahasa Arab amiyah digunakan untuk keperluan komunikasi atau percakapan sehari-hari. Budaya/tradisi Arab sangat mementingkan keramahtamahan terhadap tamu, kemurahan hati, keberanian, kehormatan, dan harga diri. Dalam hal kesenian dan warisan tradisional, Arab Saudi memiliki berbagai koleksi seni tradisional yang menunjukkan adanya keragaman budaya, seperti lagu-lagu yang bercorak kelautan dan lagu-lagu yang bernuansa padang pasir dan pedesaan, sampai adanya bermacam kesenian panggung dan tarian tradisional. Wilayah Arab Saudi terbagi atas 13 Provinsi, yaitu : Bahah, Hududusy Syamaliyah, Jauf, Madinah, Qasim,Riyadh, Syarqiyah (Provinsi Timur), 'Asir, Ha'il, Jizan, Makkah, Najran, Tabuk.Ibukota Arab Saudi adalah Riyadh.²

B. Politik Dalam Negeri Arab Saudi

Arab Saudi adalah sebuah negara yang masih menganut sistem kerajaan di kawasan Timur Tengah. Kerajaan Arab Saudi berasal dari Dinasti Saud yang dirintis sejak abad ke-18 di daerah Najd yang terletak di bagian tengah Semenanjung Arab. Berdirinya dinasti Saud berawal dari tokoh yang bernama Amir Muhammad bin Sa'ud (1703-1792).³Kerajaan Arab Saudi dikuasai oleh keluarga Al-Saud yang berpijak pada ideologi mahzab Wahhabi yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan

²*Ibid.*

³David E Long and Bernard Reich (eds.), *The Government and Politics of The Middle East and North Africa*. Boulder, Colorado: Westview Press. 1980, hal 89

dan pengembangan pengaruh pemerintah keluarga Al-Saud di semenanjung jazirah Arab. Keputusan Arab Saudi menggunakan mazhab Wahhabi sebagai ajaran dan faham resmi berawal dari pertemuan antara Muhammad Ibn Sa'ud dengan Muhammad Abd Al-Wahab. Al-Saud merupakan tokoh politik yang kemudian bertemu dengan Muhammad Ibn Wahhab, seorang tokoh spiritual yang menganut faham Wahhabi. Keduanya memutuskan untuk menggabungkan pemahamannya masing-masing untuk dapat mewujudkan Daulah Islamiyah. Sistem pemerintahan negara-negara di jazirah Arab yang pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa wilayah ini sampai kira-kira satu abad sebelumnya merupakan bagian dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani yang menganut sistem pemerintahan yang berbentuk kekhilafahan. Terhitung pada awal abad ke-16 hampir seluruh wilayah Arab berada di bawah kekaisaran Utsmani.⁴

Arab Saudi menganut sistem monarki absolut dengan Raja sebagai kepala pemerintahan dan Negara. Sistem monarki (kerajaan) berasal dari kata Mono yang berarti satu dan Archein yang berarti kekuasaan. Monarki adalah sebuah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Raja atau Kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dimana dalam membuat kebijakan berada ditangan Raja. Arab Saudi merupakan negara yang murni menggunakan hukum Islam sebagai dasar untuk peraturan-peraturan di dalam negerinya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar yang dirilis pada tahun 1993, berisi 83 prinsip-prinsip (atau ayat) yang menegaskan

⁴Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000., hal 143

kembali landasan atau dasar kerajaan yang telah berjalan sejak masa awal berdiri. Diantarnya pada Pasal pertama yang menyatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi adalah konstitusi Arab Saudi. Selanjutnya, dalam Pasal 5, sistem politik digambarkan sebagai kerajaan. Undang-Undang Dasar juga menekankan pentingnya nilai-nilai Islam. Pada pasal 44 disebutkan tiga kekuasaan negara, yaitu pengadilan atau lembaga hukum, eksekutif dan kekuasaan organisasional, dan menyatakan bahwa Raja adalah sumber utama pusat kekuasaan tersebut. Meskipun demikian, pengadilan atau lembaga hukum dijelaskan sebagai kekuatan independen dalam Pasal 46, yang anggota-anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh surat keputusan kerajaan. Hal yang sama berlaku kepada wakil perdana menteri, menteri, deputi menteri dan pejabat senior. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh Raja.

Raja Arab Saudi menduduki hampir semua posisi penting dalam pemerintahan, mendominasi keluarga besar Al Saud, menguasai politik serta ekonomi Arab Saudi. Penguasa Arab Saudi (Raja) memiliki kecenderungan yang kuat untuk membatasi sesempit mungkin berlakunya nilai-nilai liberal dan demokratis, serta membatasi partisipasi rakyatnya untuk masuk ke dalam lingkup politik . Kekuasaan politik amat terpusat pada Raja yang memegang berbagai jabatan sebagai berikut :⁵

1. Kepala Dinasti Saudi;

⁵Sidik Jatmika, *Op Cit.*, Hal 70

2. Perdana Menteri;
3. Kepala Eksekutif;
4. Imam Keagamaan Tertinggi;
5. Komandan Angkatan Bersenjata;
6. Kepala Pengadilan;

Dengan melihat kekuasaan yang ada pada raja di Arab Saudi, maka dapatlah dikatakan bahwa kerajaan Arab Saudi menekankan kembali pandangan islam, dimana antara agama dan Negara secara historis tidak dapat dipisahkan. Rakyat Arab Saudi memperlihatkan solidaritas yang amat besar dan dukungan bagi pemimpin politik, yaitu raja, yang membuat tuntutan serta melaksanakan kontrol atas rakyat. Menurut Frank Tachau keadaan ini dipengaruhi oleh lima karakteristik yang memberi kesan bahwa, (1) di Arab Saudi hanya terdapat pola kekuasaan hirarkis, (2) terdapat eksklusifisme yang di dasarkan pada kelompok Wahhabi, (3) fleksibilitas strategis khususnya yang berkaitan pada ketidakstabilan dan pemanfaatan sumber daya minyak, (4) terdapatnya konsentrasi kekuasaan di pusat sehingga hampir tidak ada pendelegasian kekuasaan di daerah, dan (5) adanya neo tradisionalisme.

Dalam perkembangannya sistem politik dan struktur politik kerajaan Arab Saudi mengalami perubahan, yaitu di mana sebelumnya kerajaan ini menganut bentuk kekuasaan yang didalamnya didominasi unsur keagamaan yang lebih

bercirikan tradisional primitif dan masih dikaitkan erat dengan adat istiadat menjadi monarki absolut. Di tengah perubahan sosial, ekonomi dan pendidikan yang sangat pesat ini, Arab Saudi tetap mempertahankan otoritas keagamaan dan politik tradisionalnya. Pertalian keluarga tetap merupakan faktor utama dalam pemerintahan Arab Saudi⁶. Kerajaan Arab Saudi masih menganut pola keterkaitan antara Negara dan agama yang masih berkaitan⁷. Sehingga dalam kehidupan social politiknya, nilai-nilai agama masih sangat kental diperlihatkan. Namun di dalam perkembangannya aktifitas politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri, raja telah membentuk sebuah dewan untuk membantu tugasnya. Pemerintahan dijalankan oleh sebuah dewan keluarga yang bekerja dengan konsesus⁸. Jabatan di dalam dewan yang dibentuk Raja hanya dapat dimiliki oleh anggota keluargakerajaan dan kepala suku yang nantinya akan menduduki jabatan kementerian dan administratif.

Unsur nepotisme memang sangat kental disetiap urusan pemerintahan Arab Saudi. Hampir sebagian besar yang menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan adalah keluarga kerajaan atau golongan yang memiliki pengaruh, misalnya para pengusaha, bangsawan. Nilai-nilai demokratis sama sekali tidak ditunjukkan didalamnya. Namun satu hal yang sama pentingnya yaitu komitmen terhadap Islam. Masyarakat Saudi hampir tidak terpengaruh oleh nasionalisme dan sekulerisme, dan penguasa Saudi mengembangkan keabsahan domestik mereka

⁶Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Jkarta: Raja Grafindo Persada, 1999., hal 187

⁷Sidik Jatmika, *Op, Cit.*, hal 158

⁸Ira M. Lapidus, *Op, Cit.*, hal 187

dengan banyak memberikan perhatian kepada urusan agama dan memberlakukan moral Islam⁹.

Di tengah-tengah perubahan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sangat cepat mengharuskan pemerintah Arab Saudi untuk mampu mengatur dinamika masyarakatnya. Konvesi lokal tradisional yang semula menjadi acuan berjalannya roda pemerintahan, dinilai sudah tidak mampu lagi diterapkan di negara tersebut. Kepemilikan industri minyak dan bertambahnya wilayah-wilayah menjadikan faktor terjadinya perubahan secara signifikan. Jika kondisi seperti ini tidak segera ditangulangi, maka pemerintah akan mengalami kesulitan jika tidak dibantu badan-badan administrasi yang fleksibel. Oleh karenanya, Raja membentuk dewan menteri guna bertanggung jawab atas anggaran dan urusan pemerintah lokal maupun regional.¹⁰ Struktur pemerintahan Arab Saudi diantaranya:

1. Raja (Kepala Pemerintahan)

Raja Arab Saudi saat ini adalah Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud. Raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Arab Saudi, tapi kekuasaannya dibatasi oleh hukum Islam. Sistem kerajaan Arab Saudi sifatnya turun temurun, jika Raja meninggal maka digantikan oleh keturunannya. Arab Saudi Raja tidak membuat undang-undang, hanya mengeluarkan dekrit kerajaan yang sesuai

⁹*Ibid.*

¹⁰Sidik Jatmika, *Op.cit.* hal 158

dengan syariah. Tugas yang paling sulit adalah mempertahankan konsensus di antara keluarga Kerajaan, para ulama dan suku-suku yang berpengaruh dalam masyarakat.

Berikut ini daftar raja yang memimpin Arab Saudi:¹¹

1.1. Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud

Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, lahir di Riyadh pada 1880 dan wafat pada 1953. Dia memerintah Kerajaan Arab Saudi pada 22 September 1932 hingga 9 November 1953. Raja yang juga dikenal sebagai Ibn Saud ini membangun kerajaannya berlandaskan Syariah Islam. Raja Ibn Saud berhasil mengubah Arab Saudi menjadi negara Islam modern serta kaya akan tradisi dan budaya. Abdul Aziz juga dikenang sebagai negarawan besar, yang pandai berpolitik, dan tahu bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.

1.2. Raja Saud bin Abdul Aziz

Raja kedua Arab Saudi ini lahir pada 1902 dan wafat pada 1969. Saud ditahbiskan sebagai Putra Mahkota pada 1933 dan memimpin kerajaan pada 1953 hingga 1964. Selama memerintah, Raja Saud mendirikan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan.

¹¹“Raja Arab dari Masa ke Masa”, dalam <http://news.okezone.com/internasional/2015/01/27/rajaarab-saudi-dari-masa-ke-masa.htm>, diakses 24 November 2016

Anak tertua dari Ibn Saud ini dikenal sebagai raja yang suka menghambur-hamburkan uang. Saud juga memberikan anak-anaknya jabatan tinggi dalam pemerintahannya. Kebiasaan ini membuat sang raja digulingkan oleh keluarganya sendiri. Sang adik, Faisal bin Abdul Aziz, pun naik takhta menggantikan Saud.

1.3. Raja Faisal bin Abdul Aziz

Raja Faisal lahir di Riyadh pada 1906 dan wafat pada 1975. masa pemerintahannya dimulai pada 1964 dan berakhir ketika dia wafat. Sebelum menggantikan Saud, Faisal diangkat menjadi Menteri Luar Negeri oleh ayahnya, Abdul Aziz. Pemimpin inovator ini dikenal sebagai raja yang saleh dan amat memerhatikan kesejahteraan rakyatnya. Faisal menjunjung tinggi program penghapusan perbudakan. Bahkan, dia membeli seluruh budak di Arab dengan uang pribadinya hingga tak ada satu pun budak di negara itu. Kemudian dia membebaskan budak yang dibelinya tersebut dan memberlakukan larangan perbudakan di Arab Saudi untuk selamanya.

1.4. Raja Khalid bin Abdul Aziz

Raja yang memerintah pada 1975 hingga 1982 ini naik takhta ketika Raja Faisal wafat. Khalid sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Hijaz pada 1932 dan ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri pada 1934. Raja Khalid banyak membuat kebijakan dalam pemerintahannya baik itu kebijakan dalam ataupun luar negeri.

11 Pada 1982, Khalid berhasil memperbaharui persenjataan kerajaan dengan mendatangkan 16 pesawat tempur dari Amerika. Khalid wafat pada 1982 karena serangan jantung.

1.5. Raja Fahd bin Abdul Aziz

Raja Kelima Arab Saudi ini dilantik menjadi Menteri Pendidikan pada 1953. Kemudian pada 1962, dia menduduki jabatan Menteri Dalam Negeri. Fahd naik takhta setelah Raja Khalid wafat pada Juni 1982. Fahd berkontribusi besar dalam bidang diplomasi internasional Kerajaan Arab Saudi. Kerja kerasnya mampu membuat perekonomian Arab Saudi berkembang pesat. Pria yang lahir di Riyadh pada 1921 ini wafat pada 1995 karena terserang stroke.

1.6. Raja Abdullah bin Abdul Aziz

Penjaga Dua Masjid Suci ini lahir di Riyadh pada 1924. Abdullah naik menjadi Raja pada 2005 setelah sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri. Pemimpin yang dikenal murah hati tersebut sudah memiliki banyak pengalaman dan memberikan pengaruh besar pada kerajaan ketika masih menjadi Putera Mahkota di masa Raja Fahd. Sejak 1995, Abdullah sudah mewakili peran Raja Fahd yang terserang stroke. Abdullah dikenal sangat kuat memegang ajaran agama dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap rakyat dan Tanah Air. Pada masa pemerintahannya Raja Abdullah banyak membuat kebijakan yang

menjadikan Arab Saudi disegani di kancah Internasional hingga saat ini. Raja Abdullah wafat pada Jumat 23 Januari 2015 karena penyakit yang dideritanya.

1.7. Raja Salman bin Abdul Aziz

Raja yang lahir pada 1935 ini sebelumnya berhasil mengubah wajah Riyadh. Kota yang awalnya hanya memiliki 200 ribu penduduk kini menjelma menjadi kota kosmopolitan dengan lebih dari 7 juta penduduk dan menjadi rumah bagi puluhan perguruan tinggi berkualitas tinggi.

Raja ketujuh Arab Saudi ini dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat besar khususnya dalam reformasi dan perubahan sosial untuk negaranya. Salman pertama kali diangkat menjadi gubernur ketika usianya baru 19 tahun. Raja Salman sebelumnya juga pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan banyak berkontribusi untuk negaranya di masa Raja Abdullah.

Seiring dengan terjadinya sejumlah perubahan sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial yang sangat cepat. Mengharuskan pemerintah Arab Saudi untuk mampu mengatur dinamika masyarakatnya. Konvensi lokal tradisional yang semula menjadi acuan berjalannya roda pemerintahan, dinilai sudah tidak mampu lagi diterapkan di negara tersebut. Kepemilikan industri minyak dan bertambahnya wilayah-wilayah menjadikan faktor terjadinya perubahan secara signifikan. Jika kondisi seperti ini tidak segera ditanggulangi, maka pemerintah akan mengalami kesulitan jika tidak dibantu badan-

badan administrasi yang fleksibel. Oleh karenanya, Raja membentuk dewan menteri guna bertanggung jawab atas anggaran dan urusan pemerintah lokal maupun regional.¹²

2. Dewan Menteri

Hampir semua keputusan kebijakan utama memerlukan masukan dari kedua pangeran dan para ulama senior Arab Saudi. Ulama senior dan pemimpin bisnis memiliki pengaruh yang cukup besar, baik sebagai penasihat utama Raja dan sebagai pengambil keputusan operasional. Pengambilan keputusan bukan hanya masalah politik semata, melainkan dalam hal tradisi dan agama, hal ini merupakan salah satu sumber kekuatan politik yang kuat di Arab Saudi dan di dalam keluarga kerajaan. Kabinet Arab Saudi ini merupakan sesuatu yang cukup praktis dan mencerminkan komposisi distribusi kekuasaan dalam jajaran keluarga kerajaan Arab Saudi yang senior dan para ulama. Kabinet adalah sebuah lembaga yang besar yang dipimpin oleh Raja, dengan lebih dari dua puluh anggota, termasuk enam menteri negara. Kabinet juga mencakup dan didukung oleh berbagai ulama.

3. Departemen dan Key Personnel

Diantara dua puluh dua departemen yang terpisah, departemen-departemen penting dan strategis dikendalikan oleh anggota-anggota senior keluarga Kerajaan. Departemen tersebut seperti Wakil Perdana Menteri, Kepala Garda Nasional, Wakil

¹²Sidik Jatmika. (2001) *op.cit.* hal 158

II Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Penerbangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penunjukan ini memberikan anggota senior dari keluarga kerajaan kendali atas pemerintah, pertahanan, keamanan internal, anggaran dan pendapatan minyak, dan melindungi area penting lainnya. Untuk memerangi pengembangan resistensi kelembagaan di beberapa departemen, pada tahun 1992 Raja mengeluarkan Keputusan yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat menempati pos menteri atau kabinet selama lebih dari lima tahun tanpa surat keputusan khusus dari Raja.

4. Majelis Al-Shura (Majelis Permusyawaratan)

Majlis Al-Shura pada awalnya terdiri dari 61 anggota, termasuk pembicara dari dewan konsultatif. Semua anggota yang ditunjuk oleh Kerajaan untuk masa jabatan empat tahun. Secara teori tugasnya adalah untuk memeriksa rencana pembangunan ekonomi dan sosial, menanyakan anggota kabinet dan memeriksa rencana tahunan yang diajukan oleh masing-masing kementerian, dan mengusulkan atau mengamandemen undang-undang baru. Namun, pada awalnya peran utamanya adalah sebagai penasihat.

Pada tahun 1997 delapan komite ad hoc didirikan sebagai hasil dari kegiatan peningkatan dewan (saat ini ada dua belas dari mereka). Komite beroperasi di sepanjang jalur demokratis dengan masing-masing anggota memiliki satu suara, seperti yang dilakukan oleh dewan secara keseluruhan. Empat tahun kemudian, pada

tahun 2001, jumlah anggota telah meningkat menjadi 150 dan peran komite diperluas, yang meliputi masalah-masalah seperti keuangan, rencana lima tahunan, Islam dan urusan sosial, dan pendidikan. Para anggota dewan sekarang dinominasikan oleh gubernur provinsi, masing-masing nominasi diperiksa oleh lembaga pengadilan kerajaan. Sejak 2002, Majelis juga memiliki hak untuk meminta setiap anggota Kabinet atau Dewan Menteri hadir dan menjawab pertanyaan. Meskipun tidak memainkan peran secara langsung dalam permasalahan keamanan dan kebijakan pertahanan dan meninjau rancangan anggaran, tetapi mereka meninjau Rencana Pembangunan

C. Politik Luar Negeri Arab Saudi

Arab Saudi adalah sebuah negara Islam, dengan demikian tentu adaketerkaitan yang erat dengan Islam, baik dalam ideologi, agama dankebudayaan. Kendati demikian, alasan pedoman agama dan bentuk pemerintahan monarki absolut tidak membuat Arab Saudi menutup mata terhadap hubungan internasional. Arab Saudi aktif menjalin hubungan bilateral dengan beberapa organisasi internasional seperti PBB, GCC, OKI, serta organisai internasional lainnya. Politik luar negeri Arab Saudi dibedakan atas tiga fase yang sesuaidengan perkembangannya serta kekuasaan yang dimilikinya. Politik luar negerisuatu negara tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dalam negerinya. Ideologi Arab Saudi yang anti radikalisme dan kombinasi dari ciri-ciri wahhabisme yang menjadikan politik luar negerinya memiliki

tiga fase. Ketiga fase tersebut mempunyai hubungan dan merupakan elemen-elemen dari kebijaksanaan cita-cita Islam Arab Saudi dan Fase-fase tersebut adalah:

1. Dynastic Alliance (1932-1956)
2. Arab Cold War (1956-1967)
3. Aid and Oil Politics (1967- sekarang)¹³

Pada fase pertama tahun 1932 dimana pada waktu itu gerakan wahhabisme sedang tumbuh di wilayah tersebut. Dengan melihat kekurangan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, dan minimnya kemampuan militernya, menjadikan Raja Abdul Aziz berfikir lebih keras agar negaranya mampu bertahan dengan segala kekurangannya. Melihat kondisi yang demikian, Raja Abdul Aziz melakukan diplomasi atau politik pragmatis demi mewujudkan keamanan bagi negaranya.¹⁴

Selama kebijakan ini, Arab Saudi menunjukkan adanya kesadaran Islamiyah, terbukti dengan adanya pemberian bantuan militer kepada bangsa Palestina secara diam-diam untuk melaksanakan pemberontakan yang bertujuan mengurangi pengaruh Inggris di Palestina pada tahun 1936-1939 bersama-sama dengan Mesir melawan ambisi dinasti Hashimite karena dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan Inggris. Arab Saudi ingin menunjukkan sikap

¹³Mohammed Ayoob, *The Political of Islamic Reassertion*, New Delhi: Vikas Publishing Home PFT LTI. hal 11

¹⁴Sidik Jatmika, *Op Cit.* hal 159

solidaritasnya yang tinggi dengan negara-negara Arab guna memperlihatkan perlawanannya terhadap pembagian wilayah di Palestina.

Berbeda dengan fase pertama, pada fase kedua ini Arab Saudi lebih berhati-hati dalam mengambil sikap berkaitan hubungannya dengan Mesir. Pemerintah Saudi menganggap bahwa Mesir adalah pioner dari ideologi radikal yang berujung pada demokratisasi. Negara ini benar-benar menghindari ideologi yang radikal, yang mana menurut pandangan Arab Saudi bahwa ideologi islam radikal itu akan berujung pada gerakan-gerakan revolusi.

Dalam perang dingin Arab, pemerintah Arab Saudi mencoba mengimbangi pan Arabisme dan solidaritas Islam.¹⁵ Arab Saudi berupaya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Islam non-Arab, seperti Irak. Dimana padatahun 1965 timbul reaksi dari Kairo yang menuduh bahwa Arab Saudi dan Irak berkeinginan untuk membentuk pakta Islam sebagai alat untuk menghancurkan persatuan Arab.¹⁶

Di bawah Raja Faisal, politik luar negeri Arab Saudi terhadap Negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai politik yang konservatif. Arab Saudi tidak menginginkan adanya perubahan status quo serta adanya perubahan-perubahan teritorial negara-negara Arab akibat adanya usaha federasi atau integrasi seperti apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab pada waktu itu. Selain itu Arab Saudi

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid.*

selalu berupaya untuk menangkal ideologi yang revolusioner sebagaimana yang disebarkan oleh negara-negara pan Arab yang berpusat di Kairo. Untuk mengimbangi arus revolusioner negara-negara republik Arab, Arab Saudi berusaha menjalin persahabatan dengan negara monarki Arab lainnya seperti Yordania, Kuwait, Maroko, Yaman royalis dan Libya sebelum revolusi Qaddafi 1969.¹⁷

Adanya perang saudara di Yaman kian memperuncing pertentangan kubu konservatif dan kubu revolusioner. Dalam hal ini Mesir membantu kaum republik yang menginginkan terjadinya pergulingan terhadap sistem monarki, sedangkan Arab Saudi melakukan counter intervensi dengan membantu kaum royalis sehingga mengakibatkan kegagalan intervensi Mesir di Yaman, tetapi pada hakikatnya perang merupakan arena konfrontasi antara kekuatan revolusioner dan kekuatan status quo di dunia Arab. Dan dengan adanya perang tersebut, Mesir dan Syria menjadi terkucil dari dunia Arab, sedangkan keretakan ideologi di dunia Arab makin berkurang.

Pecahnya perang Arab-Israel merupakan perang kilat, yakni terjadi selama enam hari, yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1967 dimana Mesir, Syria dan Yordania mengalami kekalahan. Tentunya hal ini mengakibatkan posisi negara Arab Saudi semakin kuat sehingga mampu mempengaruhi setiap momen penting yang terjadi di dunia Arab. Seusai perang Arab-Israel, sengketa Yaman dapat diselesaikan dengan adanya konferensi Khortum dimana Arab Saudi menawarkan bantuan kepada Mesir

¹⁷Asghar Ali Engineer, *op.cit*, hal 275

untuk menarik pasukannya dari Yaman dan Arab Saudi menyetujui berdirinya suatu republik di Yaman. Dengan demikian Arab Saudi menganggap Mesir bukan lagi sebagai sebuah ancaman bagi kepentingannya di kawasan Teluk. Selanjutnya Arab Saudi kemudian menghimbau Mesir dan negara-negara yang berada di garis depan untuk lebih memfokuskan perhatian kepada Israel, Palestina maupun Yerusalem yang dianggap sebagai lawan yang radikal di kawasan Teluk.

Pada fase ketiga yang dimulai sejak tahun 1967, Arab Saudi muncul sebagai sebuah negara yang dominan dan berusaha merubah perimbangan kekuasaan di Timur-Tengah sesudah adanya perang Arab-Israel 1967, serta berusaha meningkatkan kekayaan minyaknya.¹⁸ Untuk itu Arab Saudi menjadi dewan pimpinan OPEC maupun OAPEC. Sampai saat ini peranan Arab Saudi masih berpengaruh, dan sangat vital dalam menentukan harga minyak dunia serta produk untuk mengambil garis kebijaksanaan yang moderat dalam menolak ekstrimisme dalam dunia perminyakkannya. Arab Saudi merumuskan kebijakannya untuk memelihara stabilitas dan kesejahteraan ekonomi internasional serta tidak merusak perdamaian hidup manusia.

Pada fase ketiga ini, sejak tahun 1967, di dalam politik luar negerinya, Arab Saudi mempunyai tiga sasaran utama, yaitu¹⁹:

¹⁸Sidik Jatmika. (2001) *op.cit.* hal 160

¹⁹Harwanto Dahlan, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, diktat kuliah, hal 24

1. Mendukung negara-negara Arab termasuk Palestina melawan Israel. Dukungan ini juga ditujukan agar tercapainya perdamaian Arab-Israel. Arab Saudi tahu bahwa Israel mempunyai kemampuan untuk menghancurkan ladang minyaknya.
2. Tercapainya stabilitas dan keamanan, serta berjuang untuk membendung pengaruh radikalisme, terutama komunisme yang dianggap bahaya utama untuk agama Islam dan kebudayaan Arab salah.
3. Memajukan Islam dengan memperjuangkan suatu kebangkitan Islam di lingkungan global. Adapun beberapa program tersebut adalah dengan memajukan perkembangan sosial dan ekonomi dalam dunia Islam termasuk menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Diantaranya adalah pembentukan bank Islam yang di nilai mampu memberikan manfaat dan bantuan kepada negara-negara Islam. Kemampuan ekonomi, militer dan sosial yang dimiliki oleh Arab Saudi menjadikan negara ini memiliki peran yang cukup penting dalam hal donasi atau bantuannya kepada negara-negara Islam. Bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap negara-negara Islam diperkirakan hampir mencapai 96% pada tahun 1976, dan $\frac{3}{4}$ diantaranya diberikan kepada negara-negara Arab.

Pada tahun 1970an politik luar negeri Arab Saudi bisa dikatakan lebih aktif daripada tahun-tahun sebelumnya. Ideologi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat

politik luar negerinya, tetapi secara terus-menerus makin memperkuat otoritas Arab Saudi sebagai penegak nilai-nilai Islam.

Pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 menyebabkan Arab Saudi melakukan embargo minyak ke negara-negara terkemuka yang mempunyai pengaruh besar dalam percaturan politik dunia. Pengaruh Arab Saudi yang semakin meningkat secara efektif menunjang bagi kepemimpinannya di dunia Arab. Berkat kekayaan yang digunakan untuk menunjang politik luar negerinya, maka pada tahun 1970an sampai dengan sekarang, Arab Saudi mempunyai peran penting dalam politik regional dan internasional, sesuai dengan arah politik luar negerinya yang liberal dan pro-barat.

Hubungan Arab Saudi dengan negara-negara barat lainnya yakni Inggris, Prancis dan Jerman semakin meningkat, bahkan ketiga negara tersebut merupakan negara pengekspor senjata bagi Arab Saudi, dimana kontrak pembelian senjata Arab Saudi dengan negara-negara itu hampir mencapai 11 milyar dollar.²⁰

Sebagai negara berorientasi non blok, Arab Saudi juga mempunyai hubungan dengan negara-negara yang sehaluan, khususnya dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika terutama dengan Islam. Hal ini dikarenakan Arab Saudi ingin menggalang solidaritas Islam internasional. Arab Saudi yang bergabung dalam OKI juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota OKI lainnya. Kemudian,

²⁰Sidik Jatmika. (2001) *Op Cit.* hal 163

hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam The Gulf Cooperation Council (GCC) juga ditingkatkan. Terbukti dengan meningkatnya konsepsi pertahanan kawasan oleh negara-negara itu sendiri, sedang pihak luar hanya boleh membantu dengan memberikan senjata-senjata yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran akan campur tangan pihak asing yang dinilai dapat memperkeruh konflik di kawasan Timur Tengah.

Jika berbicara mengenai politik luar negeri Arab Saudi, tentunya tidak bias lepas dari hubungannya dengan Amerika Serikat, sikap pro-barat dan anti komunis yang dianut Arab Saudi mendorong terjalinnya hubungan dengan barat terutama dengan Amerika Serikat sangat erat bahkan sudah sampai tingkat sekutu. Secara politis, hal demikian bisa dimengerti karena adanya alasan kepentingan pembangunan, pertahanan dan keamanan Arab Saudi yang sangat mengandalkan dunia barat.²¹ Hubungan keduanya dinilai mempunyai persamaan kepentingan, antara lain:

1. Arab Saudi dan Amerika Serikat sama-sama anti komunis dan antiggerakan radikal revolusioner,
2. Arab Saudi dan Amerika Serikat menginginkan stabilitas di kawasan Teluk,

²¹*Ibid*, hal 162

3. Arab Saudi beserta Amerika Serikat mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan mengalirnya minyak ke negara-negara industri agar tetap menguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli minyak.²²

Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat merupakan hubungan yang special dan komplementer dengan kehadiran ARAMCO sejak tahun 1933 yang merupakan penghubung paling kuat di antara kedua negara tersebut. Arab Saudi adalah salah satu kawan dagang Amerika Serikat yang terpenting, yang maksudnya Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi dengan imbalannya, maka Arab Saudi mengeluarkan 25% dari anggaran belanjanya untuk mengimpor senjata dari Amerika Serikat, dan dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat mensuplai sekitar 90% keperluan militer bagi Arab Saudi. Amerika Serikat di sini bertindak sebagai pelindung integritas wilayah dan keamanan nasional Arab Saudi. Pada saat Mesir melakukan pemboman atas wilayah Arab Saudi semasa perang saudara di Yaman pada awal tahun 1960-an pesawat-pesawat Amerika terbang di atas wilayah sama sebagai ancaman terhadap Mesir untuk tidak meneruskan petualangan militernya di wilayah Arab Saudi.

Pada saat Arab Saudi mengalami ketakutan terhadap ancaman ekspor revolusi Republik Islam Iran, Amerika memberikan komitmen pembelaannya terhadap eksistensi Arab Saudi. Ketergantungan Arab Saudi terhadap perlindungan militer Amerika Serikat kian menguat tahun 1979 dalam kasus sebagai berikut :

²²*ibid*, hal 66-67

1. Tahun 1979, Khomeini mengambil alih Iran dan menetapkan ekspor revolusi,
2. November 1979, terjadi pendudukan Mekkah oleh para pemberontak antipenguasa Arab Saudi,
3. Desember 1979, Uni Soviet invasi ke Afghanistan yang memperkuat kekhawatiran akan kian meluasnya pengaruh komunisme Uni Soviet di Timur Tengah.

Bagi Amerika Serikat, Arab Saudi adalah salah satu Negara koalisinya yang bisa membantunya dalam mencapai kepentingan Amerika di kawasan Teluk. Kebijakan tersebut tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya.²³

²³Muhammad. (2014). *Op Cit.*.